

HUBUNGAN KENAIKAN NILAI UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR) DENGAN NILAI UPAH PEKERJAAN BORONG DALAM KEGIATAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG

Andi Purnomo¹

¹Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia,
Indonesia

Email:andi.purnomo@gmail.com

ABSTRACT

Nowadays, the dynamic progresses of industry often collides with its own labors because of many issues, one of them is the monthly salary. Actually Government has released a rule that regulate the minimum increasing of regional allowance annually, called UMR. The rule also applies to the building construction that is usually paid based on the volume of workload or unit price that increases periodically. Building construction project is usually well planned, including its labor payment. However at the same period, both the government regulation and project planning is being held, and this has raised curiosities in terms of its relevance, therefore the objective of this study is to determine the relevance of the annual increasing of the minimum regional sallary (UMR) with the increasing of the unit price. Then, in the budget project planning (RAB), a designer could use the government regulation of minimum allowances to calculate the increasing of labor cost. Actually, the government released another regulation consist of procedures for calculation of unit price of land for buildings and housing standard (SNI) to calculate the cost by volume of works, but its still need the daily workers payment that's very varied in every group of workers. The research method was collecting annual regulation released by the government and interviewing with a few foreman about their unit price that was stated on the working contract (SPK). The result of this study indicate that there is no relevance between the increasing of minimum regional sallary of it and the increasing of the unit price. Therefore, designers should make item by item volume cost to create budget project planning perfectly or use government standard to state maximum unit price in each volume of works.

Keywords : allowance, UMR, RAB, goverment standard, unit price

PENDAHULUAN

Dalam dunia ketenaga-kerjaan yang berkembang pesat belakangan ini, para pelaku bisnis khususnya di Indonesia sering mengalami kendala mengenai besarnya upah dan berapa kenaikannya tiap tahun, yang harus dibayarkan untuk pekerja yang membantu mengembangkan bisnis mereka. Nilai yang harus dibayarkan sering terhubung dengan jumlah kebutuhan hidup minimal yang harus dikeluarkan oleh pekerja itu sendiri. Pemerintah berusaha menengahi permasalahan tersebut dengan membuat peraturan-peraturan yang melindungi hak pekerja dalam menerima besaran upah minimum dan melindungi pengusaha dari ketidak wajaran tuntutan

pekerja dalam menerima upah. Dalam penetapan Upah Minimum Regional (UMR), pemerintah akan selalu melakukan pengkajian setiap tahunnya. Upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, berlaku secara umum dan penetapan dari upah minimum tersebut disuatu daerah akan berbeda dengan daerah yang lain. Tentu saja pertimbangan penetapan dan mekanismenya dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing berdasarkan survey dan analisis yang cukup rumit. Hal ini akan selalu dilakukan pengkajian untuk setiap tahunnya seiring kebutuhan hidup minimum seorang pekerja.

Dunia konstruksi juga tidak lepas dari permasalahan tentang besarnya nilai upah,

pada saat setelah suatu kegiatan konstruksi selesai dilaksanakan, kemudian akan dimulai kegiatan konstruksi yang baru, sering terjadikendala yaitu upah yang direncanakan pada suatu jenis pekerjaan, dengan realisasi pembayaran upah akan timpang, karena pekerja menuntut kenaikan nilai upah sedangkan perhitungan rencana anggaran biaya sering kali hanya merupakan perkiraan saja. Pelaksanaan kegiatan konstruksi yang baik, adalah kegiatan tersebut sebelumnya harus direncanakan, dan kemudian diaplikasikan anggaran biayanya, sehingga kegiatan konstruksi tersebut menjadi terencana, teraplikasikan dan terukur secara matang.

Kegiatan konstruksi pada awalnya harus direncanakan secara matang baik dalam aspek kekuatan, metode kerja, permasalahan sosial dan lain sebagainya. Hal yang paling penting dari semua perencanaan tersebut adalah semua perencanaan tersebut harus dihitung berapa nilai anggaran biayanya. RAB adalah analisis kegiatan yang akan dilakukan dalam kegiatan konstruksi. Dalam pembuatan RAB, selain memperhitungkan material yang akan diaplikasikan, pelaku konstruksi yang dalam hal ini adalah tim perencana juga pasti akan memperhitungkan berapa nilai upah dan jasa tiap-tiap jenis pekerjaan dengan tingkat kesulitannya masing-masing. Permasalahan yang biasanya timbul pada tahap perencanaan dan perhitungan RAB adalah, tim perencana sering mengalami kesulitan saat menetapkan atau memprediksi nilai upah suatu pekerjaan, dan biasanya tim perencana akan memperhitungkannya dengan asumsi bahwa dipekerjaan atau proyek yang lalu, pada daerah yang sama, nilainya dinaikkan sekian persen.

Dalam hal membantu melindungi hak pekerja kegiatan konstruksi, pemerintah juga mengeluarkan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk yang terbaru adalah No :28/PRT/M/2016 tentang analisis

harga satuan pekerjaan bidang Pekerjaan umum. Bagian analisa harga satuan bidang Cipta Karya. Dengan melihat *indeks* koefisien dasar dari peraturan tersebut, apabila dilihat dari SNI yang dipakai sebagai acuan tentang harga satuan pekerjaan yang selama ini dipakai, maka peraturan tersebut dikeluarkan masih berdasarkan SNI 2835-2008 yaitu “Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan tanah untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan”, yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional. Hal ini sebagai dasar legal yang dikeluarkan pemerintah dalam penetapan upah, salah satunya adalah upah borong. Pada penerapannya, sering ditemukan kesulitan karena masih berupa pendekatan yang dituangkan dalam bentuk *indeks* pekerjaan dan harus dikalikan dengan perkiraan nilai upah masing-masing level pekerja dalam suatu pekerjaan, misalnya nilai upah mador, upah tukang, sampai upah pekerja (lebih sering disebut laden). Hal ini disebabkan karena nilai indeks yang tercantum dalam SNI merupakan pendekatan dari banyak pengamatan, sedangkan nilai upah masing-masing pekerja dengan mandornya sebagai pimpinan para pekerja sangat bervariasi nilainya tergantung dari tingkat pengalaman dan keahlian dari yang bersangkutan.

Prosentase kenaikan upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah dan ditetapkan tiap tahunnya, adalah kenaikan yang berdasarkan perhitungan yang sangat rumit dan diyakini telah diperhitungkan mampu mencukupi kebutuhan minimum pekerja. Prosentase kenaikan ini diharapkan dapat menjadi jawaban dalam membantu tim perencana dalam memastikan nilai kenaikan upah borong suatu pekerjaan berdasarkan data historis pekerjaan terdahulu.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan antara lain oleh Admodjo, Haryanto, Meidianto, dan David. (2001), dengan judul Studi tentang Manajemen Pekerja Bangunan untuk Pemborong Pemula di Surabaya. Atau Daniel Kusnanto, Adhitya R.D, Indriani S., dan Budiman P. (2015),

dengan judul Studi Tentang Harga Satuan dan Upah pada Proyek Konstruksi, dan beberapa penelitian tentang upah pada proyek konstruksi, belum ditemukan bahasan tentang tingkat kenaikan upah borong terhadap upah tahun sebelumnya, dua penelitian yang dipakai sebagai literature awal pada penelitian kali ini lebih berfokus kepada kelayakan nilai upah borong yang diterima pekerja dan kesesuaian nilai upah borong terhadap peraturan pemerintah tentang standar nasional indeks pekerjaan gedung dan perumahan. Jadi penelitian mengenai ada tidaknya hubungan antara kenaikan upah minimum regional dengan kenaikan harga upah borong dalam pekerjaan konstruksi bangunan gedung dan perumahan belum pernah dilakukan. Maka penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan tingkat kenaikan UMR dengan kenaikan upah borong kegiatan konstruksi bangunan gedung sehingga seorang perencana dapat memperhitungkan upah borong pekerjaan dalam suatu proyek konstruksi secara tepat tanpa perlu melakukan survey harga satuan borong.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data historis perubahan nilai UMR yang berlaku di provinsi D.I.Yogyakarta selama 4 (empat) tahun terakhir untuk melihat persentase kenaikannya, kemudian akan dibandingkan dengan survey lapangan secara langsung berupa wawancara dengan pemborong upah kegiatan konstruksi selama periode yang sama. Dengan didapatkannya angka prosentase perbandingan tersebut diharapkan untuk kemudian dapat ditetapkan untuk penetapan angka upah pekerjaan oleh perencana suatu kegiatan konstruksi dan tidak hanya berupa perkiraan kasar saja.

Survey lapangan yang dilakukan untuk penelitian ini dilakukan pada proyek-proyek dari sebuah Yayasan pendidikan di Yogyakarta meliputi :

1. Proyek penambahan gedung kuliah, berlantai 3 pada tahun 2013.
2. Proyek pembangunan gedung toko buku, jl. Kaliurang, berlantai 4 dan dengan fasilitas terpadu seperti bank, kantin, pusat bahasa, dan ruang penerbitan buku pada tahun 2014.
3. Proyek pengembangan ruang rawat inap sebuah rumah sakit internasional, pada tahun 2014-2015.
4. Proyek pembangunan hotel, di lokasi sekitaran kawasan Malioboro, berlantai 8 pada tahun 2015-2016.

Responden yang memberikan data diambil dari pihak yang berkompeten langsung dalam hal pembuatan surat perintah kerja yaitu operator administrasi teknik pada proyek-proyek tersebut. Data hasil survey juga dilakukan silang data dengan beberapa mandor yang bekerja pada proyek tersebut, untuk melihat kevalidan data yang diberikan oleh masing-masing operator administrasi teknis pada proyek yang diambil datanya tersebut.

Pengamatan pada penelitian ini dibatasi hanya pada beberapa pekerjaan yang paling sering ada dalam suatu kegiatan konstruksi bangunan gedung antra lain :

1. Pekerjaan pemasangan $\frac{1}{2}$ bata dengancampuran 1PC : 2 PS,
2. Pekerjaan Plesteran-aci tebal 15mm campuran 1 PC : 3 PS,
3. Pekerjaan skoning sudut lebar 10mm,
4. Struktur kolom dan balok praktis.

Selain mengumpulkan data lapangan sebagai data primer, pada penelitian ini juga dilakukan analisis data perhitungan upah borong berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk yang terbaru adalah No :28/PRT/M/2016 tentang analisis harga satuan pekerjaan bidang Pekerjaan umum. Bagian analisa harga satuan bidang Cipta Karya, sebagai tolok ukur harga yang berlaku di proyek-proyek yang dilakukan pengambilan data tersebut.

LANDASAN TEORI

Pengertian Upah Minimum

Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap propinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Propinsi.

Hal-hal yang diambil sebagai dasar pertimbangan penetapan upah minimum adalah sebagai berikut,

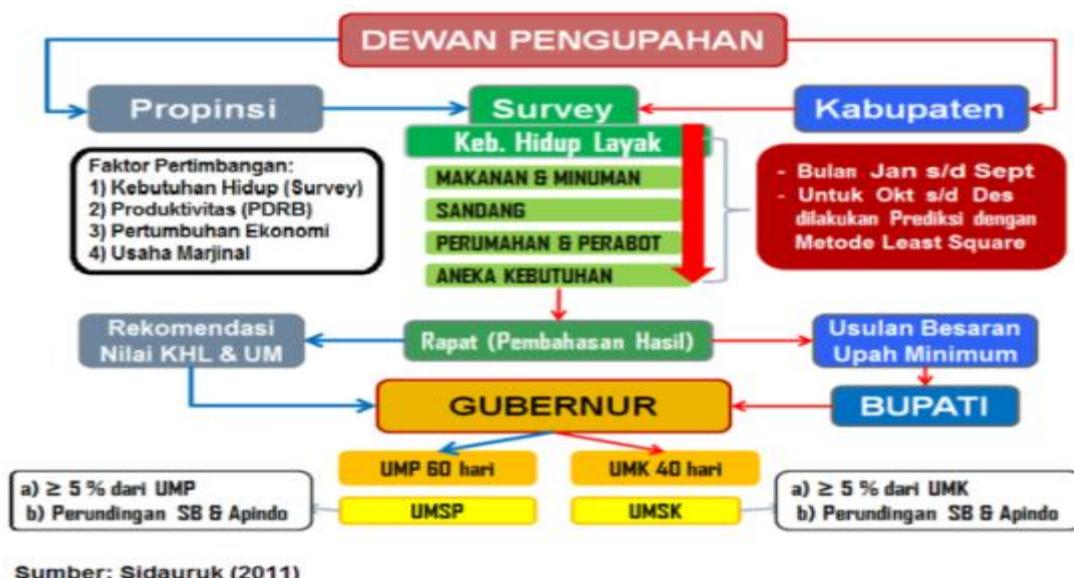
1. Sebagai jaring pengaman agar nilai upah tidak melorot dibawah kebutuhan hidup minimum.
2. Sebagai wujud pelaksanaan Pancasila, UUD 45 dan GBHN secara nyata.
3. Agar hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat yang memiliki kesempatan, tetapi perlu menjangkau sebagian terbesar masyarakat berpenghasilan rendah dan keluarganya.
4. Sebagai satu upaya pemerataan pendapatan dan proses penumbuhan kelas menengah.
5. Kepastian hukum bagi perlindungan atas hak – hak dasar Buruh dan

keluarganya sebagai warga negara Indonesia.

6. Merupakan indikator perkembangan ekonomi Pendapatan Perkapita.

Mekanisme Penetapan Upah

Peraturan pelaksana terkait upah minimum diatur dalam Permenakertrans No. 01 Tahun 1999 tentang Upah minimum, Kepmenakertrans No. 226/MEN/2000 tentang perubahan beberapa pasal dalam Permenakertrans No 01 tahun 1999. Sebagai Gambaran, mengenai mekanisme penetapan Upah Minimum dapat dilihat dari Gambar 1 yaitu diagram mekanisme penetapan upah minimum. Penetapan upah minimum dilakukan di tingkat propinsi atau di tingkat kabupaten/kotamadya, dimana Gubernur menetapkan besaran upah minimum propinsi (UMP) atau upah minimum Kabupaten/Kotamadya (UMK), berdasarkan usulan dari Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah (sekarang Dewan Pengupahan Provinsi atau Kab/Kota) dengan mempertimbangkan, kebutuhan hidup pekerja, indeks harga konsumen, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja dan sebagainya.



Sumber: Sidauruk (2011)

Gambar 1. Mekanisme Penetapan Upah Minimum

Tabel 1. Kutipan Lampiran Per-Men No 28/PRT/M/2016

	Kebutuhan	Satuan	Indeks
Bahan	Bata merah	Buah	70,000
	PC	kg	8,320
	PP	m ³	0,049
Tenaga kerja	Pekerja	OH	0,300
	Tukang batu	OH	0,100
	Kepala tukang	OH	0,010
	Mandor	OH	0,015

Perhitungan Upah Borongan Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, No :28/PRT/M/2016

Koefisien analisis harga satuan adalah angka yang menunjukkan jumlah kebutuhan bahan dan/atau tenaga kerja dalam satuan tertentu. Angka-angka ini dapat digunakan untuk menghitung RAB (rencana anggaran biaya) suatu pekerjaan bangunan. Sebagai contoh untuk perhitungan, digunakan salah satu contoh angka koefisien dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, No :28/PRT/M/2016 tentang analisis harga satuan pekerjaan bidang Pekerjaan umum. Bagian analisa harga satuan bidang Cipta Karya, yaitu pekerjaan pasangan bata merah dengan perbandingan campuran PC: PS = 1:6 (tabel 1), dapat diketahui nilai koefisien pada kolom indeks. Untuk memasang bata merah dengan luasan 1 m² memerlukan 70 buah bata. Angka 70 ini tentu berdasarkan penelitian ditambah dengan safety factornya. Begitu juga dengan semen dan pasir, setiap pasangan 1 m² membutuhkan 8,32 kg semen dan 0,049 m³ pasir.

Upah Borong dan Penetapannya

Upah merupakan suatu imbalan jasa yang harus diberikan oleh kontraktor kepada tenaga kerja sebagai balas jasa terhadap hasil kerja mereka (Rustan dan Gunawan, 2002). Upah menurut kesatuan hasil merupakan upah yang diberikan kepada

para pekerja berdasarkan kinerja. Misalnya kerja borongan yang mengkaitkan pengupahan dengan jumlah atau sebagian hasil yang dihasilkan oleh pekerja secara langsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi upah borongan sendiri adalah pengaruh jam kerja, lokasi pekerjaan, sifat dari pekerjaan, permintaan dan penawaran dari tenaga kerja (Daniel Kusnanto, Adhitya R.D, Indriani S., Budiman P., 2015).

Selain itu, dalam kegiatan pemborongan yang dipimpin oleh seorang mandor, pengaturan komposisi tenaga kerja yang menyangkut mengenai jumlah tenaga kerja yang dipakai sangat penting. Hal ini dikarenakan dalam penentuan komposisi tenaga kerja akan berpengaruh terhadap biaya yang harus dikeluarkan oleh mandor untuk membayar pekerja dan tukang yang akan dipakai dalam kegiatan pemborongan. Bila komposisi tenaga kerja yang telah ditentukan tidak sesuai maka akan berdampak pada pekerjaan yang tidak efektif dan boros akibat menumpuk terlalu banyak pekerja (Admodjo dan Meidianto, 2001) Dalam prakteknya, masing-masing pemborong akan mengajukan penawaran harga satuan pekerjaan berdasarkan kapasitas tenaga kerja yang dimilikinya dalam menghasilkan jumlah volume pekerjaan tertentu, kemudian dibandingkan dengan kebutuhan membayar tenaga kerja dari pemborong tersebut ditambah keuntungan tiap-tiap volume pekerjaan.

Tabel 2. Data Nilai UMR D.I.Yogyakarta dalam Kurun Waktu 5 Tahun Terakhir

KOTA/KABUPATEN	2013	2014	2015	2016
Kota Yogyakarta	Rp 1.065.247	Rp 1.173.300	Rp 1.302.500	Rp 1.452.400
Kabupaten Sleman	Rp 1.026.181	Rp 1.127.000	Rp 1.200.000	Rp 1.338.000
Kabupaten Bantul	Rp 993.484	Rp 1.125.500	Rp 1.163.800	Rp 1.297.700
Kabupaten Kulon Progo	Rp 954.000	Rp 1.069.000	Rp 1.138.000	Rp 1.268.870
Kabupaten Gunung Kidul	Rp 947.114	Rp 988.500	Rp 1.108.249	Rp 1.235.700

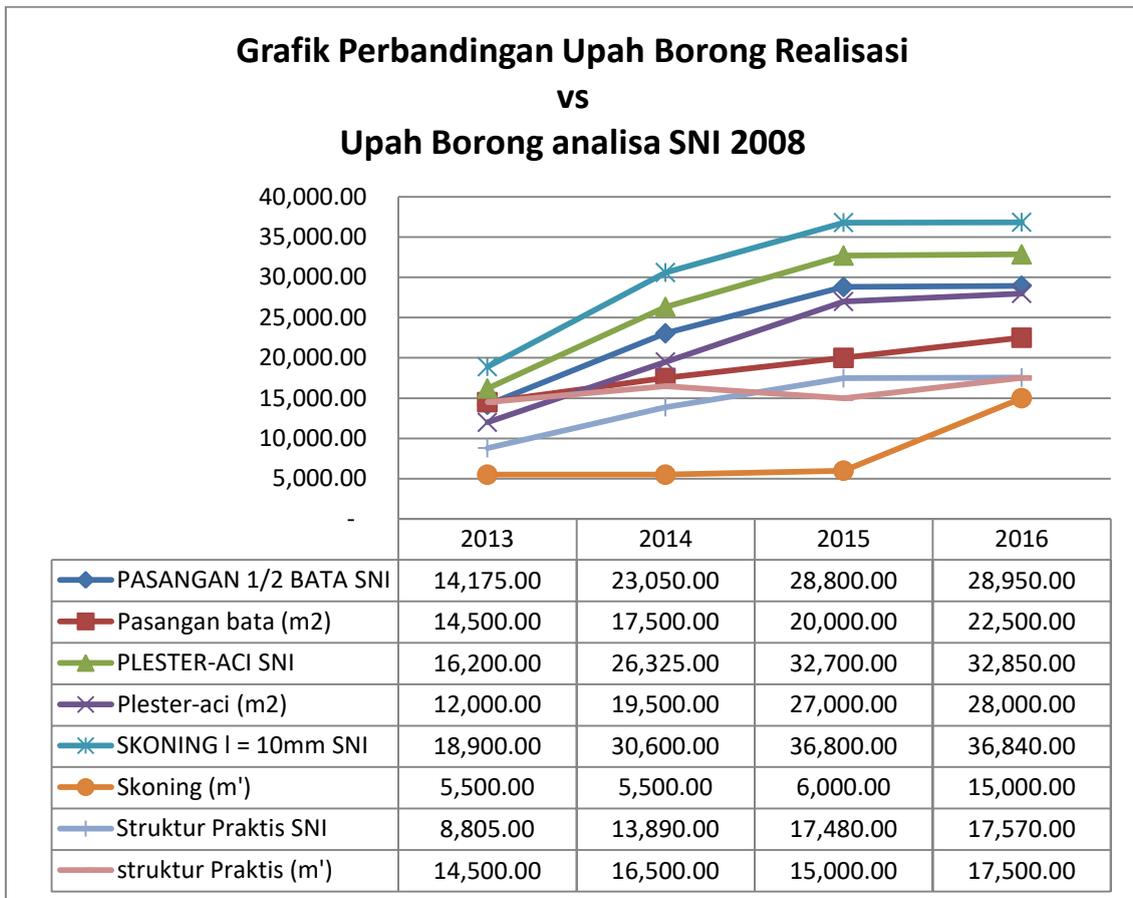
sumber : www.bkpm.go.id, www.hrcentro.com, www.tribunjogja.com, www.beriberita.com

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Setelah mengumpulkan data yang didapatkan dari beberapa sumber, nilai penetapan upah minimum regional yang diputuskan oleh pemerintah propinsi D.I.Yogyakarta adalah seperti tercantum dalam Tabel 2, kenaikan UMR tiap tahunnya memang tidak stabil dan tidak merata untuk tiap-tiap sub-daerah/kabupaten dalam satu propinsi. Hal ini terjadi berdasarkan proses penetapan yang berbeda-beda untuk tiap daerah. Tergantung dari rapat bersama yang dilakukan oleh kepala daerah, yang dalam hal ini adalah Bupati, dengan para pengusaha lokal di kabupaten tersebut. Setelah tahun 2016 nilai kenaikan UMR di propinsi D.I.Y disamakan dalam satu nilai tertentu (kenaikan dari 2015 ke 2016 adalah 11,5%).

Upah pekerjaan yang akan dibandingkan dengan kenaikan UMR, yang diamati dalam penelitian ini adalah pekerjaan yang umum ada dalam setiap kegiatan konstruksi bangunan gedung dan sering dipakai sebagai tolok ukur awal bahwa harga penawaran yang diajukan termasuk kategori standar atau tidak. Pengambilan data dilakukan secara langsung dari data proyek yaitu harga kesepakatan antara pelaksana lapangan dengan pihak pemborong

upah/bass borong seperti terilustrasikan dalam Gambar 2, analisis dari kenaikan harga borong yang disetujui antara pihak pelaksana proyek dengan pihak pemborong upah menunjukkan bahwa kenaikan harga untuk tiap tahunnya tidak selalu linier, bahkan ada pekerjaan yang turun harga per-volume pekerjaannya dikarenakan selalu ada negosiasi tiap-tiap harga satuan volume tersebut sebelum dikeluarkannya surat perintah kerja (SPK) sebagai pengikat harga kesepakatan. Seorang pemborong dapat memutuskan bahwa hal itu dapat dijalankan sesuai harga kesepakatan sering kali hanya berdasarkan atas kebutuhan untuk mempertahankan tenaga kerja yang dimiliki supaya tidak berpindah bekerja kepada pemborong lain, dan juga berdasarkan perkiraan kasar bahwa pekerjaannya mampu ditekan untuk dapat menghasilkan keuntungan. Hal yang bertolak belakang dan akan berbeda dengan kenaikan yang dianalisis berdasarkan indeks Per-Men no 28/PRT/M/2016 dan masih menggunakan indeks SNI 2835-2008, meskipun hasil analisis didapatkan dari wawancara langsung untuk mengetahui upah harian masing-masing tenaga kerja yang dimiliki oleh pemborong tiap tahunnya, apabila dibandingkan secara langsung, maka dapat tergambar dalam Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Grafik Perbandingan Upah realisasi dengan upah borong hasil analisis SNI 2835-2008 Setelah dirata-rata

Rata-rata kenaikan upah pekerjaan borong realisasi, perhitungan upah pekerjaan borong hasil analisis SNI 2835-2008, dan upah minimum regional apabila dibandingkan secara langsung dapat dilihat dalam Gambar 3 dan dapat dianalisis bahwa tidak ada kesamaan pola antara kenaikan UMR secara tahunan dengan kenaikan harga upah borong realisasi proyek maupun secara analisis SNI. Hal yang sebenarnya ingin dicari dalam penelitian ini adalah, hubungan kenaikan upah pekerja secara umum berdasarkan UMR dengan kenaikan upah borong hasil kesepakatan yang diambil di proyek. Meskipun pola grafiknya hampir serupa, namun nilai kenaikannya tidak seirama dan tidak dapat suatu pendekatan. Dalam penelitian inipun dicoba dikembangkan dengan membandingkan kenaikan upah harian pekerja dengan

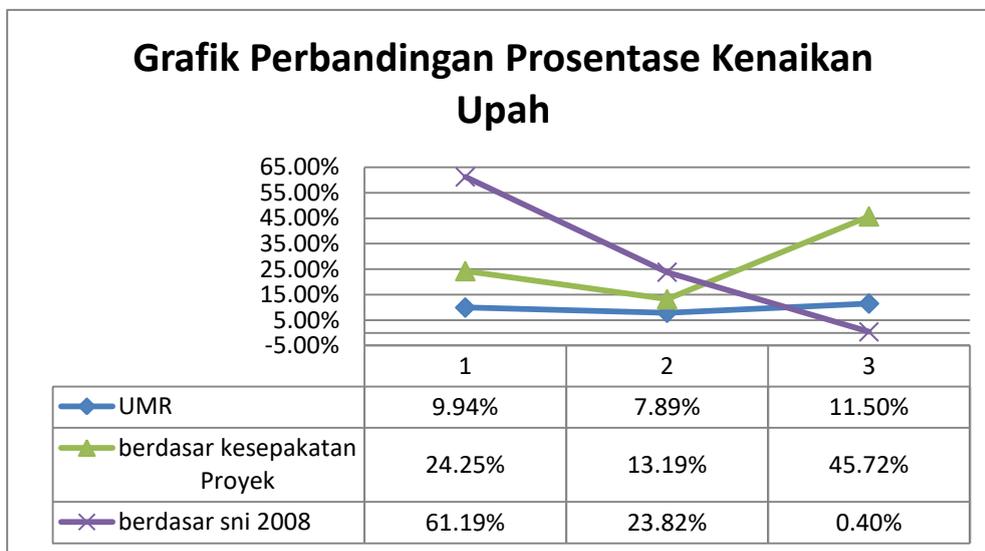
kenaikan nilai UMR tiap tahunnya dan didapatkan perbedaan pola kenaikan. Hal tersebut sangat dimungkinkan terjadi karena nilai kenaikan UMR dianalisis berdasarkan kebutuhan hidup minimal, sedangkan kenaikan upah harian pekerja dianalisis berdasarkan tingkat kinerja dan loyalitas pekerja itu sendiri. Kenaikan upah borong hanya dapat dihubungkan dengan acuan SNI 2008 tentang indeks angka pekerjaan, namun hanya sebagai batasan nilai maksimum kesepakatan harga. Sehingga, dalam suatu proses pembuatan rancangan anggaran biaya, tetap harus melakukan survey yang banyak untuk mendapat kan harga upah borong yang tepat.

Dalam penelitian ini memang tidak dilakukan analisis terhadap angka indeks kinerja pekerja secara riil dilapangan namun dapat dilihat pula dalam

perbandingan kenaikan harga antara upah borong dengan upah yang dianalisis terhadap indeks SNI 2835-2008, bahwa upah borong kesepakatan masih lebih rendah/murah. Hal ini juga sejirama dengan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Daniel Kusnanto, Adhitya R.D, Indriani S., Budiman P. (2015) yaitu Studi Tentang Harga Satuan dan Upah pada Proyek Konstruksi. Didalam penelitian

tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Indeks pekerja pada pekerjaan borongan lebih kecil dari SNI, tetapi indeks tukang pada pekerjaan borongan pada beberapa pekerjaan lebih besar dari SNI. Hal ini disebabkan pada kenyataan di lapangan, tingkat keahlian tukang dan pekerja berbeda-beda, sehingga komposisi tenaga kerja disesuaikan dengan kebutuhan.

Gambar 3. Grafik perbandingan kenaikan UMR vs Upah realisasi borong (SPK) vs analisis upah berdasarkan SNI 2835-2008



KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat dirangkum dari hasil analisis dan kajian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Kenaikan upah minimum regional (UMR) tidak memiliki hubungan secara linier dengan kenaikan upah borong pekerjaan.
2. Nilai upah borong hanya dapat dianalisis dengan pendekatan sebagai batasan maksimum perhitungan rencana anggaran biaya yaitu dengan memakai acuan SNI 2835-2008, namun masih harus mengetahui berapa nilai upah pekerja kegiatan konstruksi secara umum sebagai kendalanya. Meskipun hasilnya masih terdapat perbedaan yang cukup jauh terhadap nilai pengajuan

penawaran pekerjaan borong yang kemudian dilakukan negosiasi kesepakatan harga upah borong, pendekatan SNI merupakan perkiraan yang memperlihatkan nilai anggaran biaya tersebut dalam batas maksimum.

DAFTAR PUSTAKA

- Wage Indicator, (2016), Pengertian Upah Minimum, diakses tanggal 1 November 2016 dari <http://www.gajimu.com/main/gaji/gaji-minimum/pengertian-upah-minimum>.
- Daniel Kusnanto, Adhitya R.D, Indriani S., dan Budiman P. (2015), Studi Tentang Harga Satuan dan Upah pada Proyek Konstruksi, Jurnal Dimensi Pratama Teknik Sipil, Univ. Kristen Petra, Surabaya

- Admodjo, H. dan Meidianto, D., (2001), Studi tentang Manajemen Pekerja Bangunan untuk Pemborong Pemula di Surabaya. Unpublished undergraduate thesis, Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 28/PRT/M/2016, Tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Bidang Pekerjaan Umum.
- SNI 2835-2008, Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Tanah Untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan, Badan Standarisasi Nasional, Jakarta.
- Rustan, R., dan Gunawan, T., (2002)., Pengukuran Produktivitas Pekerja sebagai Dasar Perhitungan Upah Kerja pada Anggaran Biaya. Unpublished undergraduate thesis, Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- UMR Daerah D.I. Yogyakarta, diakses tanggal 29 Oktober 2016 dari <http://regionalinvestment.bkpm.go.id/front/dumr/34>
- Hrcentro.com (2014), UMR/UMK Indonesia (2015), http://www.hrcentro.com/umr/daerah_istimewa_yogyakarta
- M. Resya Firmansyah (2015), Besaran UMK 2016 di D.I.Y Diumumkan Hari Ini, diakses tanggal 29 Oktober 2016 dari <http://jogja.tribunnews.com/2015/11/02/pengumuman-besaran-umk-2016-di-diy-diumumkan-hari-ini>
- Berberita.com, (2016), Inilah Daftar UMK UMR Kabupaten/Kota Yogyakarta 2016 Lengkap diakses tanggal 29 Oktober 2016 dari <http://www.berberita.com/2015/11/daftar-umk-umr-kabupaten-kota-yogyakarta-2016.html>